

**ANALISIS PERAN UN WOMEN DALAM MEMAJUKAN KESETARAAN
GENDER DI KOREA SELATAN**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen
Ilmu Hubungan Internasional*

Oleh:

VICHA SEPTINA RAIS

E061201099

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2024

HALAMAN JUDUL

SKRIPSI

**ANALISIS PERAN UN WOMEN DALAM MEMAJUKAN KESETARAAN
GENDER DI KOREA SELATAN**

Disusun dan diajukan oleh

VICHA SEPTINA RAIS

E061201099

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada
Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin*

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2024

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : ANALISIS PERAN UN WOMEN DALAM MEMAJUKAN KESETARAAN GENDER DI KOREA SELATAN

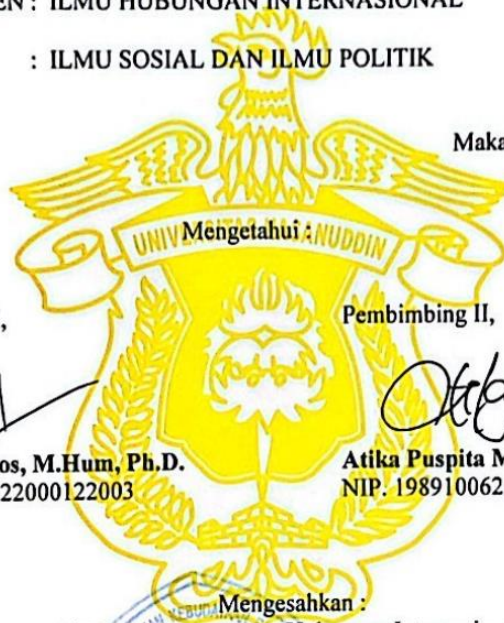
N A M A : VICHA SEPTINA RAIS

N I M : E061201099

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL


FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 5 Agustus 2024



Pembimbing I,

Pembimbing II,


Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D.
NIP. 197602022000122003


Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA.
NIP. 198910062024062001

Mengesahkan :
Plt. Ketua Departemen Hubungan Internasional,


Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si
NIP. 197508182008011008

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : ANALISIS PERAN UN WOMEN DALAM MEMAJUKAN KESETARAAN GENDER DI KOREA SELATAN

N A M A : VICHA SEPTINA RAIS

N I M : E061201099

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Jum'at, 26 Juli 2024.



Ketua : Ishaq Rahman, S.IP, M.Si

Sekretaris : Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA.

Anggota : 1. Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D.

2. Aswin Baharuddin, S.IP, MA

3. Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, M.IR.

DEPARTMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL FISIP UNHAS

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vicha Septina Rais

NIM : E061201099

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

***“Analisis Peran UN Women dalam Memajukan Kesetaraan Gender
di Korea Selatan”***

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain kecuali kutipan dari ringkasan yang setiap salah satunya telah saya jelaskan sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 12 Agustus 2024

Yang menyatakan,



Vicha
Vicha Septina Rais

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Hasanuddin, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vicha Septina Rais
NIM : E061201099
Program Studi : Hubungan Internasional
Departemen : Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Ilmiah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Hasanuddin, **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Analisis Peran UN Women dalam Memajukan Kesetaraan Gender di Korea Selatan

Bersama perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-Eksklusif ini, Universitas Hasanuddin berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Makassar
Pada Tanggal : 12 Agustus 2024

Yang menyatakan,

(Vicha Septina Rais)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Hirabbil Alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Peran UN Women dalam Memajukan Kesetaraan Gender di Korea Selatan” ini dengan baik. Tidak lupa shalawat serta salam yang tidak henti-hentinya penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi suri tauladan dalam menjalani kehidupan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyadari begitu banyak hal yang telah penulis lewati hingga sampai titik saat ini. Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih dan rasa syukur kepada orang tua penulis, Mama **Suharti** yang tak henti-hentinya memberikan doa, dukungan dan cintanya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Kepada Papa **Alm. Muh Rais Rabana** yang tidak bisa melihat secara langsung proses penulis tapi penulis tau papa selalu melihat setiap perkembangan penulis dari jauh. Kepada seluruh keluarga penulis, **Abang Tofik, Abang Teta, Kak Vani, dan Kak Vina**, terima kasih telah menjadi saudara yang sangat mensupport penulis hingga akhir, terima kasih atas saran, kritikan dan cintanya kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan, dukungan, bimbingan, saran, serta kritik dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan rasa syukur kepada pihak-pihak yang telah hadir selama proses penulisan hingga selesainya skripsi ini.

1. Terima kasih kepada Dekan FISIP UNHAS **Bapak Prof. Dr. Phil. Sukri, S.I.P., M.Si** dan Wakil Dekan FISIP UNHAS **Ibu Prof. Dr. Hasniati, S.Sos.,M.Si.** dan **Bapak Dr. Moehammad Iqbal Sultan, M.Si.**, serta **Bapak Prof. Dr. Suparman, M.Si** yang telah membantu penulis dalam segala urusan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Terima kasih kepada Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNHAS **Bapak Prof. H. Darwis, MA, Ph.D** dan Sekretaris Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNHAS **Bapak Aswin Baharuddin, S.IP, MA,** yang telah memberikan bantuan dan arahan serta ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan dan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah SWT.
3. Terima kasih kepada dosen Hubungan Internasional FISIP UNHAS yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan, kepada **Bapak H.Abdul Razaq Z.Cangara S.IP., MIR, Bapak Dr. H.Husain Abdullah M.Si, Bapak Dr. Patrice Lumumba, MA, Bapak Muh.Nasir Badu, S.Sos., M.Hum., Ph.D., Bapak Ishaq Rahman S.IP., M.Si., Ph.D.(Cand.), Bapak Drs. H.M. Imran Hanafi M.A., M.Ec, Bapak Burhanuddin S.IP. M.Si, Bapak Dr. Munjin Syafik Asy'ari M.SI, Bapak Dr. H. Adi Suryadi Culla MA, Bapak Agussalim Burhanuddin S.IP., MIRAP Ph.D (Cand.), Bapak Biondi Sanda Sima, S.IP., M.Si., L.LM, Bapak Muh.Ashry Sallatu S.IP., M.Si, Ibu Nurjannah Abdullah S.IP., M.A, Ibu Pusparida Syahdan S.Sos., M.S,**

Ibu Mashita Dewi Tidore, S.IP., M.A., Ibu Nur Isdah S.IP., MA.

Semoga Bapak dan Ibu sekalian selalu diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah SWT.

4. Terima kasih banyak kepada **Ibu Seniwati, S.Sos., M.Hum., Ph.D** selaku Pembimbing I, dan **Ibu Atika Puspita Marzaman, S.IP., MA** selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah SWT.
5. Terima kasih kepada staf dan pegawai Departemen Ilmu Hubungan Internasional **Ibu Rahma** dan **Pak Ridho** yang telah membantu penulis dalam segala urusan administrasi selama perkuliahan hingga selesai.
6. Terima Kasih kepada seluruh staf dan pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuannya kepada penulis dalam pengurusan berkas selama perkuliahan.
7. Terima kasih buat teman-teman kuliah penulis dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan ini, **Nesyu, Nathan, Aal, Ginayah, Meu, Fiqa, Stenly** yang telah menemani penulis selama proses penulisan skripsi ini walaupun terkadang lebih banyak mainnya, tapi kehadiran teman-teman sekalian memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
8. Terima Kasih kepada teman-teman penulis, **Zona Nyaman (Eby, Caca, Isda, Dewi)** yang selalu ada saat penulis butuh, telah menemani penulis

dan memberikan doa dan semangat saat proses penulisan skripsi ini berlangsung.

9. Terima kasih kepada keluarga KKN penulis, **Mama Rikka, Kakak Tiwai, Kakak Qila, Adek Umma**, yang telah kebersamai dan memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima Kasih kepada teman-teman **ALTERA 2020** yang telah memberikan bantuan-bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih pada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu, keluarga besar, teman-teman penulis dan orang-orang yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Kerangka Konseptual	13
E. Metode Penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Organisasi Internasional.....	22
B. Kesetaraan Gender	29
C. Penelitian Terdahulu	35
BAB III GAMBARAN UMUM.....	39
A. United Nations Women sebagai Organisasi Internasional untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	39
B. Ketimpangan Gender di Korea Selatan.....	48
BAB IV PERAN DAN DAMPAK UN WOMEN DALAM MEMAJUKAN KESETARAAN GENDER DI KOREA SELATAN.....	61
A. Peran UN Women dalam memajukan kesetaraan gender di Korea Selatan	61
B. Dampak UN Women dalam Memajukan Kesetaraan Gender di Korea Selatan	94
BAB V PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Kerja indeks kesenjangan gender global	5
Gambar 1.2 Bagan Kerangka Konseptual.....	13
Gambar 3. 1 Lima Alasan Utama Gangguan Karir Wanita	57
Gambar 4. 1 Jumlah Wanita yang Berhenti Bekerja.....	98
Gambar 4. 2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Korea Selatan dari Tahun 2000-2023	99

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Perbedaan Persentase Penghasilan Penuh Waktu Pria dan Wanita	55
---	----

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran apa yang dilakukan UN Women selaku organisasi internasional yang menangani permasalahan terkait gender dan perempuan dan juga dampak yang diberikan dalam memajukan kesetaraan gender di Korea Selatan. Penelitian ini menggunakan teori organisasi internasional dan kesetaraan gender. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan menggunakan data sekunder sebagai jenis datanya, yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, website resmi dan dokumen yang berhubungan dengan fokus penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesenjangan gender yang terjadi di Korea Selatan akibat budaya patriarki yang masih berkembang mengakibatkan perempuan di Korea Selatan kesulitan mendapatkan haknya dengan adil. Oleh karena itu, UN Women selaku organisasi internasional berperan dalam memajukan kesetaraan gender di Korea Selatan melalui pusat keunggulan UN Women untuk kesetaraan gender yang dibangun di Korea Selatan. Pusat ini telah memberikan dampak terutama dalam bidang ekonomi dan kekerasan terhadap perempuan di Korea Selatan.

Kata Kunci: Kesetaraan Gender, Organisasi Internasional, UN Women, Korea Selatan

ABSTRACT

This research aims to find out what role UN Women plays as an international organization that deals with issues related to gender and women and also the impact it has in advancing gender equality in South Korea. This research uses the theory of international organizations and gender equality. The method used is a qualitative research method using secondary data as the type of data, which is obtained from books, journals, articles, official websites and documents related to the focus of the research. The results of this study show that the gender gap that occurs in South Korea due to the patriarchal culture that is still developing makes it difficult for women in South Korea to get their rights fairly. Therefore, UN Women as an international organization plays a role in advancing gender equality in South Korea through the UN Women center of excellence for gender equality built in South Korea. This center has made an impact especially in the field of economics and violence against women in South Korea.

Keywords: *Gender Equality, International Organization, UN Women, South Korea*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korea Selatan belum mencapai tingkat kesetaraan gender yang memadai, salah satu penyebabnya dikarenakan negara ini masih menganut budaya patriarki (Alami et al., 2023). Budaya patriarki yang berkembang di Korea Selatan telah membagi gender secara diskriminatif, sehingga dalam hierarki Korea Selatan melihat laki-laki sebagai pihak yang lebih unggul dan mendominasi. Hal ini membatasi upaya pemberdayaan perempuan dan juga partisipasinya dalam ruang publik (Alami et al., 2023). Di Korea Selatan, terdapat istilah umum bagi istri yaitu "*Djip-saram*" atau yang berarti orang yang tinggal di rumah, sedangkan istilah bagi suami yaitu "*Bakat-Yangban*" yang artinya laki-laki berada diluar rumah (Hyunsoo, 2021:p.256). Dari istilah tersebut dapat dilihat bagaimana gender sangat distrukturalkan antara perempuan dan laki-laki. Hal ini tentunya hanya memberikan keuntungan bagi laki-laki saja yang menjadi kepala keluarga nantinya.

Perekonomian Korea Selatan mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, dari 2 miliar dolar AS pada tahun 1961 menjadi 1,6 triliun dolar AS pada tahun 2019 (Hyunsoo, 2021:p.257). Dibalik semua itu, banyak yang tidak menyadari bahwa pada tahun 1960 an dan 1970 an, terdapat perempuan-perempuan Korea Selatan yang harus bekerja di pabrik-pabrik yang memproduksi tekstil, pakaian jadi, sepatu, dan barang-barang elektronik dalam kondisi yang sangat buruk dan upah yang rendah. Namun, akibat kebijakan pemerintahan yang ada pada pertengahan tahun 1970 an hingga awal tahun 1990an yang berfokus pada

partisipasi laki-laki dalam industri manufaktur dan membuat banyak pekerja wanita yang harus dirumahkan dan bersekolah. Akibatnya menurun dengan sangat drastis partisipasi perempuan dalam angkatan kerja yaitu menjadi 43,9% pada tahun 1984 (Hyunsoo, 2021:pp.257-258). Terlihat bahwa kesenjangan gender yang terjadi di Korea Selatan, salah satu penyebabnya yaitu dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, dimana kebijakan tersebut sangat mengedepankan partisipasi dari laki-laki.

Korea Selatan merupakan salah satu pasar tenaga kerja yang gendernya paling tidak setara (*most gender unequal*) di dunia (Peng & Jun, 2021:p.2). Perempuan di Korea Selatan sering dipandang sebagai orang yang patuh, perhatian, simpatik, baik hati, suka membantu, dan tidak keberatan diberi upah rendah dalam bekerja, sedangkan laki-laki Korea dicirikan sebagai orang yang mandiri, bertanggung jawab, agresif, dan kuat. Dengan pemahaman ini, perusahaan di Korea Selatan memilih pekerja yang diinginkan dan juga mendorong pemisahan pekerjaan dengan melihat gendernya (Mahmoudi et al., 2024;p.75). Dalam hal ini, terlihat bahwa faktor budaya juga sangat berperan dalam ketidakseimbangannya gender yang ada di dunia kerja. Di Korea Selatan sendiri, budaya perusahaannya dibangun berdasarkan praktik budaya tradisional.

Krisis keuangan yang terjadi tahun 1997, berdampak pada lapangan kerja, pendapatan dan kesehatan masyarakat (Mahmoudi et al., 2024;p.75). Secara khusus, perempuan lebih rentan akan terkena resesi ekonomi yang terjadi secara tiba-tiba. Pada saat itu, menjadi hal yang normal melihat perempuan Korea Selatan berada pada pekerjaan yang berbahaya dan tidak tetap dengan upah

rendah, kondisi kerja yang tidak aman, dan kurangnya perhatian terhadap hak-hak serikat pekerja mereka (Mahmoudi et al., 2024,p.75). Krisis keuangan yang terjadi membuat perempuan pada saat itu harus menormalisasikan pekerjaan yang tidak aman bagi dirinya dan dengan merasakan diskriminasi yang terus dilakukan kepadanya.

Menurut dari laporan OECD, pada tahun 2014 perempuan di Korea Selatan memperoleh penghasilan 36,7 persen dibandingkan laki-laki (Mahmoudi et al., 2024:p.81). Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Korea (NHRCK), perempuan mencakup 57,5 persen dari angkatan kerja tidak tetap, sedangkan laki-laki berjumlah 37,2 persen. Selain itu, pekerja paruh waktu perempuan hanya dibayar sekitar 35,2 persen dari gaji pekerja penuh waktu laki-laki dan 53,2 persen dari gaji pekerja perempuan penuh waktu (Mahmoudi et al., 2024:p:82) Dianggap bahwa mempertahankan pekerjaan penuh waktu itu penting untuk menopang identitas maskulin, sedangkan posisi kerja tidak tetap bagi perempuan merupakan hal yang normal. Ketimpangan pendapatan yang terjadi ini dianggap remeh dan tidak ada yang membenarkan lebih tingginya gaji yang diperoleh oleh laki-laki.

Kesenjangan upah berdasarkan gender di Korea Selatan masih menjadi salah satu yang terbesar di negara-negara OECD yakni sebesar 32,5% pada tahun 2019 lebih dari dua kali lipat rata-rata OECD (12,9%), jauh lebih tinggi dibandingkan AS (18,5%) dan Kanada (17,6%), dan relatif lebih tinggi dibandingkan negara dengan kesenjangan upah gender tertinggi berikutnya di OECD, yaitu Jepang (23,5%) (Peng & Jun, 2021:p.2). Pada tahun 2022, Korea

Selatan menjadi salah satu negara yang memiliki tingkat kesenjangan upah berdasarkan gender terbesar dan ini berlaku selama 26 tahun berturut-turut terhitung dari tahun 1996 (Alami et al., 2023). Dari tahun ketahun kesenjangan upah berdasarkan gender yang dirasakan di Korea Selatan memang masih sangat memprihatinkan. Di negara-negara OECD, sangat jauh perbandingan kesenjangan upah yang dirasakan Korea Selatan dengan negara-negara maju lainnya.

Perempuan yang berpendidikan tinggi di Korea Selatan memperoleh penghasilan 28% lebih rendah dibandingkan laki-laki dengan tingkat pendidikan serupa. Kesenjangan pendapatan bahkan lebih besar terjadi pada masyarakat Korea dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah (Takahashi et al., 2020:p.6). Diskriminasi dan kesenjangan upah berdasarkan gender di Korea Selatan terlihat dari pendapatan perempuan hanya sebesar 62% dari pendapatan laki-laki. Kemudian, dalam studi yang representatif secara nasional, 58,2% perempuan pekerja melaporkan mengalami diskriminasi gender dalam hal pendapatan, dibandingkan dengan 5,2% laki-laki, sementara 79,3% perempuan melaporkan diskriminasi gender dalam hal peluang promosi, dibandingkan dengan 3,9% laki-laki (Kim et al., 2019:p.2). Dari hasil penelitian di atas, terlihat bahwa walaupun perempuan memiliki pendidikan yang tinggi akan tetap mendapatkan penghasilan di bawah dari penghasilan laki-laki di Korea Selatan. Terlihat juga persentase perempuan pekerja yang mengalami diskriminasi sangat tinggi dalam hal mendapatkan promosi.

The Global Gender Gap Index Framework



Gambar 1.1 Kerangka Kerja indeks kesenjangan gender global
Sumber : World Economic Forum, Global Gender Gap Index, 2022.

Indeks Kesenjangan Gender Global yang diterbitkan oleh World Economic Forum menilai kemajuan menuju kesetaraan gender di berbagai negara dengan mengukur kesenjangan melalui empat indikator utama: partisipasi dan peluang ekonomi, akses terhadap pendidikan, tingkat kesehatan, dan partisipasi dalam kepemimpinan politik .(World Economic Forum, 2022).

Menurut Global Gender Gap Report yang diterbitkan oleh World Economic Forum, Korea Selatan adalah salah satu negara dengan peringkat terendah di dunia dalam hal "Partisipasi dan Peluang Ekonomi" (peringkat 124 dari 149 negara) pada tahun 2018. Global Indeks Kesenjangan Gender juga menunjukkan bahwa Korea Selatan berada di peringkat ke-88 dalam hal partisipasi angkatan kerja perempuan dan ke-121 dalam hal kesetaraan upah gender untuk pekerjaan serupa. Rata-rata upah perempuan di Korea Selatan rata-rata 36,7 % lebih rendah dibandingkan rata-rata upah laki-laki (per 2012, perhitungan sendiri berdasarkan database World Klems (2014) (Oyvatt & Onaran, 2022:p.1). Kemudian pada tahun 2021, tercatat bahwa jarak

kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan sebesar 31,1 persen. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perempuan dan laki-laki memiliki beban kerja yang sama namun gaji yang diperoleh perempuan hanya sebesar 68,9 persen dari gaji laki-laki (Alami et al., 2023). Dari data yang diterbitkan diatas, sangat jelas bahwa dalam kesetaraan gender di dunia kerja dalam hal partisipasi maupun dengan upah sangatlah rendah. Kesenjangan sangat terlihat jelas dalam upah yang diterima oleh perempuan dan laki-laki di Korea Selatan walaupun telah mendapatkan pekerjaan dengan beban yang sama.

Menurut data dari Global Gender Gap Report yang diterbitkan oleh World Economic Forum, Korea Selatan menempati urutan 99 dari 146 negara dalam peringkat kesetaraan gender (world economic forum, 2022:p.216). Korea Selatan berada di peringkat bawah dan masih kalah dengan negara-negara berkembang seperti Indonesia yang berada di peringkat 92, Nepal yang berada di peringkat 96, dan juga Kamboja yang berada satu peringkat di atasnya yaitu 98.(world economic forum, 2022:pp. 125,196,267)

Pada saat pandemi Covid-19 menunjukkan adanya ketidaksetaraan gender pada pasar tenaga kerja Korea Selatan. Hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa perempuan terpaksa meninggalkan pekerjaannya, sedangkan laki-laki tetap bekerja selama pandemi COVID-19. Diperkirakan sekitar 5,5 persen perempuan dipecat dari pekerjaan, yang berarti dua kali lipat angka pemecatan laki-laki, yakni sebesar 2,5 persen. Selain itu, pada pekerja perempuan yang sudah menikah, kemungkinan terjadinya pengangguran 3,7

kali lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang belum menikah, yaitu 70,5 persen lebih rendah (Mahmoudi et al., 2024:p.83). Hal ini menunjukkan bahwa tuntutan perempuan pada saat pandemi COVID-19 lebih berat jika dibandingkan dengan laki-laki. Diskriminasi yang dirasakan perempuan Korea Selatan saat pandemi sangat dirasakan mulai dari pemecatan yang dilakukan karena kebanyakan perusahaan lebih memiliki pekerja laki-laki untuk tetap bekerja selama pandemi berlangsung.

Di Korea Selatan, perempuan menghadapi diskriminasi dan ancaman pengangguran selama pandemi COVID-19. Akibat cuti sebagai orang tua dan berkurangnya jam kerja, perempuan mengalami berbagai jenis kerugian akibat menggunakan sistem penitipan anak di tempat kerja selama pandemi COVID-19. Seorang perempuan rata-rata membutuhkan waktu 1,3 tahun lebih lama untuk mencapai pangkat yang sama dengan laki-laki, dan semakin tinggi pangkatnya maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai pangkat yang sama dengan laki-laki (Mahmoudi et al., 2024:p.84). Diskriminasi yang dirasakan perempuan saat pandemi COVID-19 itu merupakan akibat dari peningkatan tanggung jawab rumah tangga dan kelelahan di tempat kerja. Karena perempuan bertanggung jawab atas pengasuhan anak, laki-laki sering kali ditugaskan pada departemen/tugas yang lebih penting dibandingkan perempuan, sehingga perempuan lebih sulit mendapatkan promosi.

Pada periode sebelum pandemi COVID-19, rata-rata upah bulanan laki-laki adalah 4,216 juta won Korea, sedangkan setelah pandemi COVID-

19, rata-rata upah bulanan meningkat sebesar 37,000 won menjadi 4,253 juta won. Meskipun upah rata-rata perempuan adalah 4,078 juta won sebelum pandemi COVID-19, upah tersebut turun sebesar 0,4 persen menjadi 4,061 juta won setelah pandemi COVID-19. Menurut penelitian terbaru yang dilakukan oleh Korea CXO Research Institute, perempuan masih akan memperoleh penghasilan hampir 38 persen lebih rendah dibandingkan laki-laki pada tahun 2020 (Mahmoudi et al., 2024:p.85). Dari penelitian diatas, terlihat perbandingan rata-rata- upah bulanan laki-laki dan perempuan Korea Selatan saat sebelum pandemi COVID-19 dan juga setelah COVID-19. Terlihat perbedaan yang dirasakan oleh laki-laki dan perempuan, selama pandemi COVID-19 malah rata-rata upah bulanan laki-laki mendapatkan peningkatan, berbeda dengan perempuan yang mengalami penurunan dan hal ini merupakan bukti diskriminasi yang dilakukan bagi para pekerja perempuan di Korea Selatan.

Kondisi kesenjangan gender yang terjadi di Korea Selatan ini sangat memprihatinkan. Kondisi ini dapat menghambat kemajuan negara dan juga kesejahteraan masyarakat akan berkurang. Oleh karena itu, kesetaraan gender harus ditegakkan di negara ini, baik perempuan ataupun laki-laki harus memiliki hak yang sama dalam hidup, berkembang, berpartisipasi dalam hal sosial, politik, dan ekonomi. Jika kesetaraan gender dapat terwujud, ini akan meningkatkan produktivitas dan juga inovasi, serta dapat mengurangi kemiskinan dan ketidakadilan sosial yang terjadi.

Akibat dari ketidakadilan yang dirasakan oleh kaum perempuan, di Korea Selatan telah terdapat banyak organisasi dan juga gerakan feminisme yang berkembang dengan tujuan untuk memajukan kesetaraan gender di Korea Selatan. Salah satu organisasi yang berperan dalam memajukan kesetaraan gender di Korea Selatan yaitu UN Women (United Nation Entity For Gender Equality and The Empowerment of Women). Di bawah organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, kehadiran UN Women ini didedikasikan untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. UN Women didirikan untuk mempercepat kemajuan dalam memenuhi kebutuhan perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia (UN Women, 2019). Tentunya UN Women memiliki tujuan untuk memajukan kesetaraan gender di seluruh dunia termasuk Korea Selatan.

UN Women memiliki tugas untuk mendukung para negara anggota dalam menetapkan standar global bagi mencapai kesetaraan gender, dan bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat sipil untuk merancang undang-undang, kebijakan, program dan layanan dalam memastikan bahwa standar tersebut akan diterapkan secara efektif dan benar-benar bermanfaat bagi perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia. Adapun peran utama dari UN Women yaitu, mendukung kebijakan kesetaraan gender, memberi dukungan finansial, dan mengkoordinasikan sistem kerja PBB (UN Women, 2019). Diharapkan keberadaan UN Women ini dapat membantu negara anggotanya dalam menyetarakan gender dalam segala aspek yang ada.

Bukti dari peran UN Women yaitu bisa dilihat dari aktifnya dalam memajukan kesetaraan gender di Korea Selatan dari tahun ke tahun. Berbagai

upaya yang dilakukan oleh UN Women agar bisa memajukan kesetaraan gender di negara ginseng, salah satunya dengan mendirikan kantor pusat UN Women di Seoul pada tahun 2022 dengan dukungan dan bantuan dari pemerintah Korea Selatan. Pusat ini melakukan pelatihan, penelitian, kegiatan hubungan eksternal pada beberapa tema seperti mengakhiri kekerasan terhadap perempuan, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan dan kepemimpinan ekonomi perempuan, kerjasama pembangunan dan gender, dan bidang perempuan, perdamaian dan juga keamanan (Asia and the Pacific, 2023). Kantor Pusat ini akan menjadi sarana bagi UN Women dalam memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Korea Selatan.

UN Women terus melakukan kerja sama dengan pemerintah Korea Selatan untuk memajukan kesetaraan gender. Pada bulan April 2023, kantor pusat UN Women menyelenggarakan lokakarya pertamanya mengenai *Women's Empowerment Principles* (WEPs) yaitu serangkaian prinsip yang memberikan bimbingan kepada perusahaan tentang cara memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di tempat kerja, pasar, dan masyarakat. Lokakarya ini dihadiri oleh hampir 60 perusahaan swasta dengan tujuan setelah bergabung dalam komunitas WEP, perusahaan akan menunjukkan komitmen mereka terhadap agenda ini, dan tentunya bekerja secara kolaboratif dalam mendorong praktik bisnis yang memberdayakan perempuan (Asia and the Pacific, 2023). Dalam hal ini diharapkan perusahaan-perusahaan di Korea Selatan dapat menerapkan dengan baik prinsip pemberdayaan perempuan dan dapat memajukan kesetaraan gender di Korea Selatan.

Segala upaya yang dilakukan UN Women dan juga gerakan-gerakan yang dilakukan di Korea Selatan diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mencapai keadilan dalam kesetaraan gender di negaranya. Dengan adanya kehadiran UN Women dan juga dukungan penuh dari pemerintah Korea Selatan tentunya akan memberikan hasil yang baik bagi kesetaraan gender di Korea Selatan.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini akan membahas peran yang dilakukan oleh UN Women dalam memajukan kesetaraan gender di Korea Selatan. Namun, agar penelitian ini lebih terarah, penulis akan lebih memfokuskan pada peran UN Women melalui Pusat keunggulan kesetaraan gender yang dibangun di Korea Selatan pada tahun 2022.

Peran UN Women dalam memajukan kesetaraan gender tentunya memiliki dampak bagi kehidupan perempuan Korea Selatan. Oleh karena itu, penulis akan menjabarkan dampak dari peran yang telah dilakukan UN Women di Korea Selatan dan akan lebih terfokus pada dampak di bidang ekonomi dan juga terhadap tingkat kekerasan kepada perempuan. Hal ini karena bidang tersebut merupakan bidang yang menjadi fokus bagi UN Women dan juga agar penelitian lebih terarah dan data yang disajikan bersumber dari literatur yang terbaru.

Untuk itu, penulis merumuskan dua pertanyaan penelitian sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran UN Women dalam memajukan kesetaraan gender di Korea Selatan?
2. Bagaimana dampak dari peran UN Women dalam memajukan kesetaraan gender di Korea Selatan

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

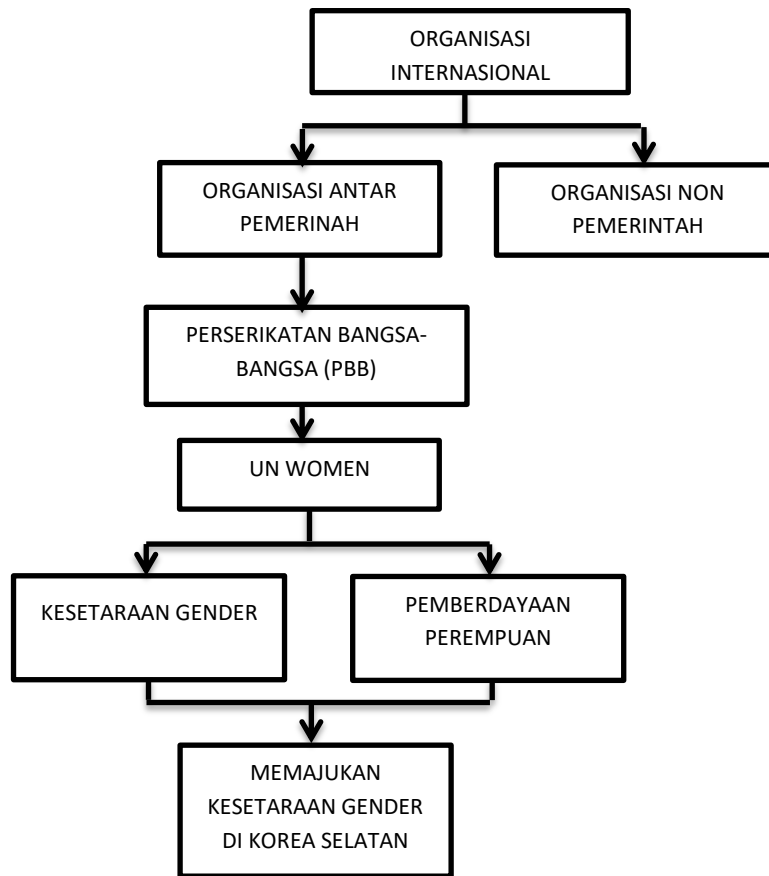
Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:.

1. Untuk menganalisis peran UN Women dalam memajukan kesetaraan gender di Korea Selatan.
2. Untuk mengidentifikasi dampak dari peran UN Women dalam memajukan kesetaraan gender di Korea Selatan.

Adapun kegunaan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan juga informasi bagi kalangan akademisi, khususnya bagi mahasiswa dan dosen-dosen hubungan internasional ataupun masyarakat umumnya yang ingin mengetahui dan mengkaji lebih dalam terkait dengan peran UN Women dalam memajukan kesetaraan gender di Korea Selatan.
2. Tentunya diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan untuk para pengkaji terkait dengan peran UN Women dalam memajukan kesetaraan gender di Korea Selatan.

D. Kerangka Konseptual



Gambar 1.2 Bagan Kerangka Konseptual
Sumber : Penulis

Berdasarkan kerangka konseptual yang dirancang dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Organisasi Internasional menjadi alat untuk menganalisis peran UN Women dalam memajukan kesetaraan gender di Korea Selatan. Organisasi Internasional sebagai tempat para negara anggota untuk mencapai tujuan bersama dan mewujudkan perdamaian dunia. Salah satu organisasi internasional yang memiliki peran penting dalam mewujudkan perdamaian dunia yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). UN Women merupakan salah satu bagian dari PBB yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di dunia salah satunya negara Korea Selatan.

Penulis juga menggunakan teori kesetaraan gender untuk menjelaskan tentang kondisi dan keadaan kesetaraan gender di Korea Selatan. Dalam hal ini, penulis juga dapat melihat peran dari UN Women dalam memajukan kesetaraan gender di Korea Selatan. Adapun pemaparan spesifik dari kerangka konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Organisasi Internasional

Salah satu pemangku kepentingan utama dalam hubungan internasional adalah Organisasi Internasional, dimana anggotanya lebih dari satu negara beroperasi bersama. Organisasi internasional diartikan sebagai perkumpulan serikat pekerja atau negara-negara yang didirikan atau diakui dengan tujuan mewujudkan tujuan bersama. Organisasi internasional umumnya terdiri dari orang-orang dari lebih dari satu negara karena mereka berkumpul dengan tujuan untuk mencapai tujuan bersama (Ahmed, 2020:p.877). Organisasi internasional didefinisikan sebagai tempat bagi negara-negara anggota untuk mencapai tujuannya.

Organisasi internasional mempunyai tiga peran yaitu sebagai instrumen dan sarana diplomasi negara berdaulat untuk mencapai tujuan politik luar negeri. Pertama, suatu organisasi harus mempunyai pandangan dan tujuan yang sama untuk terus menjadi instrumen kebijakan negara anggota. Selain itu, organisasi internasional dapat menjadi alat untuk mengurangi intensitas konflik di lingkungan global. Peran kedua adalah organisasi internasional sebagai arena yang berarti organisasi internasional berperan sebagai tempat atau forum bagi

negara-negara untuk berkumpul, berdiskusi, dan mendiskusikan kerjasama atau suatu permasalahan. Organisasi Internasional mengizinkan anggotanya untuk mengekspresikan pandangan dan saran mereka mengenai tatanan internasional. Organisasi internasional dapat dijadikan sarana untuk mencapai solusi terhadap suatu permasalahan. Ketika anggota organisasi ingin bernegosiasi, menyetujui, atau tidak setuju mengenai suatu masalah, organisasi dapat mengatur pertemuan untuk tujuan mereka, yang pada akhirnya menghasilkan konvensi, perjanjian, atau peraturan. Terakhir, organisasi internasional bertindak sebagai aktor independen. Mereka dapat bertindak secara internasional tanpa dipengaruhi oleh kekuatan eksternal dan digunakan sebagai aktor pengambil keputusan yang stabil dan koheren dalam batas-batas wilayah mereka. Keputusan diambil secara independen berdasarkan standar hukum internasional dan demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Organisasi internasional dapat tampil di panggung dunia dengan tingkat independensi dan efektivitas tertentu (Rahayu et al., 2023:p.642). Secara keseluruhan, organisasi internasional mempunyai peran sebagai alat yang dapat mengurangi terjadinya konflik di kancah global, dan sebagai tempat para negara bekerja sama, serta sebagai aktor independen yang tidak bisa dipengaruhi keputusannya oleh pihak luar.

Organisasi internasional yang selama ini paling besar dalam sejarah pertumbuhan kerjasama di dunia yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didirikan pada tahun 1945 dengan bantuan 51 negara. Alasan dibentuknya PBB ini merupakan upaya dalam membangun perdamaian antar bangsa dan menjadi tempat untuk mendorong perdamaian dan juga pembentukan hukum internasional.

Peran utama PBB dinyatakan untuk memastikan adanya perlindungan hak asasi manusia, dan penyaluran bantuan kemanusiaan (Ahmed, 2023:p.877). PBB merupakan organisasi internasional yang sangat berpengaruh dalam tatanan global dalam membantu melindungi perdamaian dunia.

UN Women adalah entitas PBB yang terdiri dari gabungan berbagai bagian di PBB yang menangani masalah gender. UN Women dibentuk untuk mengatasi tantangan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender secara lebih efektif. UN Women memiliki tiga peran utama yaitu, untuk mendukung kebijakan, standar dan pembentukan norma oleh badan antar pemerintah; untuk membantu negara-negara anggota PBB dalam menerapkan standar-standar tersebut; dan memimpin inisiatif kesetaraan gender dalam sistem PBB (Rose Taylor, 2020:p.5-6). Tentunya hal ini akan membantu PBB untuk lebih bertanggung jawab atas komitmennya mengenai kesetaraan gender termasuk dengan pemantauan rutin terhadap kemajuan sistem secara keseluruhan.

Teori Organisasi Internasional ini nantinya akan digunakan dalam menganalisis peran UN Women dalam memajukan kesetaraan gender di Korea Selatan. Dengan menggunakan teori ini, penulis dapat melihat upaya dan peran UN Women sebagai Organisasi Internasional dalam menjadi aktor, instrumen dan arena khususnya bagi Korea Selatan.

2. Kesetaraan Gender

Dalam konsep gender perbedaan antara laki-laki dan perempuan didasarkan pada konstruksi kondisi sosial dan budaya. Perilaku diperkenalkan

sejak lahir. Gender bukanlah suatu kodrat atau ketentuan Tuhan, oleh karena itu gender berkaitan dengan proses keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang terstruktur, ketentuan sosial dan budaya di tempat mereka tinggal atau dilahirkan (Harahap et al., 2019:p.69). Gender dalam hal ini bukanlah merupakan hal yang mutlak namun penyesuaian manusia dalam berperilaku semestinya.

Ann Oakley (1972) dalam *Sex, the Gender and society* mengatakan bahwa gender berarti perbedaan yang bukan bersifat biologis dan bukan merupakan sifat Tuhan. Perbedaan biologis (jenis kelamin) merupakan kodrat Tuhan yang secara permanen berbeda dengan pengertian gender. Gender merupakan perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yaitu perbedaan yang bukan merupakan ketentuan Tuhan, tetapi diciptakan oleh manusia (bukan alam) melalui proses sosial dan budaya yang panjang (Harahap et al., 2019:p.70). Dalam definisi ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa gender berbeda dengan jenis kelamin, yang dimana gender merupakan hal yang dapat dibentuk oleh struktur sosial yang ada.

Kesetaraan gender adalah persamaan hak, tanggung jawab, dan peluang bagi semua gender. Kesetaraan gender menyiratkan bahwa kepentingan, kebutuhan dan prioritas semua gender harus dipertimbangkan, dengan mengakui keberagaman kelompok yang berbeda. Kesetaraan gender bukanlah isu perempuan namun harus menjadi perhatian dan melibatkan semua gender secara penuh (Jung & Tsujisaka, 2019:p.4). Walaupun kesetaraan gender sering

dilibatkan dengan perempuan namun sebenarnya kesetaraan ini harus mencakup semua gender yang ada tanpa membedakan satu dengan yang lainnya.

Kesetaraan gender didefinisikan oleh *United Nations International Cultural Educational Fund* (UNICEF) sebagai “menyamakan kedudukan bagi anak perempuan dan perempuan dengan memastikan bahwa anak mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan bakatnya” (Shimy & Fattah El-Shimy, 2019:p.12). Hal ini menjelaskan bahwa dalam definisinya, kesetaraan gender berarti semua anak perempuan dan perempuan harus mendapatkan haknya tanpa mendapatkan diskriminasi akibat gendernya.

Kesetaraan gender merupakan prasyarat bagi pembangunan manusia. Suatu masyarakat tidak dapat berkembang tanpa upaya untuk mendorong kesetaraan status bagi perempuan dan laki-laki di bidang ekonomi, politik, dan hukum (termasuk hak-hak reproduksi) (Takahashi et al., 2020:p.1). Dengan meningkatnya kesetaraan gender yang ada maka semakin naik pula tingkat pembangunan manusia.

United Nation dalam mendefinisikan kesetaraan gender yaitu bukan hanya hak asasi manusia fundamental, tetapi juga dasar yang diperlukan untuk dunia yang damai, makmur dan berkelanjutan (United Nations, 2022). Dengan mencapai kesetaraan gender di dunia ini akan menjadi dasar dari perdamaian dunia.

Konsep kesetaraan gender dalam penelitian ini, akan membantu penulis dalam melihat bentuk kesetaraan gender secara umum. Di Korea Selatan sendiri terjadi kesenjangan gender, dalam artian Korea Selatan belum mencapai tingkat

kesetaraan gender yang memadai sehingga UN Women sebagai Organisasi Internasional yang berfokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan berperan dalam memajukan kesetaraan gender di Korea Selatan.

E. Metode Penelitian

1. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dikarenakan data empiris yang diperoleh merupakan data kualitatif yang berisi di dalamnya kumpulan kata-kata dan bukan sebuah rangkaian angka. Permasalahan dalam penelitian ini digambarkan oleh fakta-fakta yang terjadi kemudian nantinya akan dihubungkan dengan fakta lainnya, dari kumpulan fakta tersebut akan ditarik sebuah kesimpulan.

Menurut Miles dan Huberman, dalam proses menganalisis data terdapat 3 alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, lalu penarikan kesimpulan atau verifikasi (Ngawi, 2019). Ketiga kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan secara bersamaan yang berarti bahwa kegiatan ini saling berhubungan dan membentuk suatu proses melingkar yang interaktif sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data. Proses ini dilakukan secara paralel untuk membentuk wawasan umum yang disebut analisis.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data yang dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan (*Library Research*). Teknik ini dilakukan dengan

mengumpulkan bahan-bahan yang terkait dengan penelitian untuk mendapatkan informasi yang objektif dan akurat. Teknik ini mengambil bahan dari sejumlah buku, majalah, liflet yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian (Sumiati, 2023).

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan membandingkan sumber-sumber pustaka untuk memperoleh data teoritis. Selain itu, melalui penelitian kepustakaan, penulis dapat memperoleh informasi tentang metode penelitian yang diantisipasi untuk menghindari duplikasi karya peneliti.

3. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yang dimana tujuannya untuk mengumpulkan data sekaligus menganalisis data dan menyajikan hasil secara deskriptif yang terperinci (Geograf, 2023). Penelitian ini akan diawali dengan menggambarkan, mencatat, menganalisis dan juga menjabarkan mengenai peran yang dilakukan UN Women dalam memajukan kesetaraan gender di Korea Selatan. Dengan kata lain, penelitian deskriptif analitis akan memusatkan perhatiannya kepada masalah-masalah yang ada pada penelitian yang dikerjakan, hasil penelitian kemudian akan diolah dan dianalisis untuk mengambil sebuah kesimpulan.

4. Jenis Data

Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder, yang peneliti tidak kumpul kan langsung melainkan diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, buletin, jurnal, artikel, surat kabar, website resmi, serta dokumen-

dokumen lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Sarjana, 2023). Data sekunder didapatkan secara tidak langsung, yang artinya dalam mendapatkannya memerlukan perantara individu ataupun dokumen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Organisasi Internasional

Organisasi internasional merupakan salah satu aspek penting dalam hubungan internasional, dimana anggota organisasi internasional yang terbentuk lebih dari satu negara ini saling bekerjasama. Organisasi internasional diartikan sebagai perkumpulan negara-negara yang berdaulat dengan tujuan untuk mewujudkan tujuan bersama (Ahmed, 2023:p.877). Hal ini juga dirasakan pada organisasi internasional UN Women, setiap negara anggotanya memiliki kepentingannya masing-masing dan mereka bergabung untuk mencapai kepentingan tersebut dengan bekerjasama dalam suatu organisasi internasional yaitu UN Women.

Perkembangan organisasi internasional sangatlah cepat. Hal ini terjadi salah satunya dikarenakan era globalisasi yang membuat negara-negara di dunia semakin lebih mudah terhubung satu sama lain. Kemajuan teknologi informasi, telekomunikasi, dan juga transportasi sangat berpengaruh dan membuat batas-batas negara semakin kabur. Alhasil terdapat banyak permasalahan lintas negara yang harus diselesaikan bersama-sama (Sugito, 2021:p.1). Perkembangan zaman memberikan kemudahan bagi negara-negara untuk saling berinteraksi satu sama lain, namun tentunya isu internasional juga akan ikut meningkat. Isu internasional yang meningkat membuat organisasi internasional lebih dibutuhkan contohnya seperti kehadiran UN Women dalam memajukan kesetaraan gender di penjuru dunia untuk menyelesaikan isu diskriminasi gender yang terjadi.

Peningkatan pertumbuhan organisasi internasional tentunya menunjukkan bahwa organisasi internasional ini memiliki peranan yang penting di dunia internasional. Bisa dilihat jika hampir semua negara di dunia tergabung dalam sebuah organisasi atau lebih. Salah satunya yaitu *United Nations* atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang saat ini merupakan organisasi internasional terbesar yang memiliki fungsi yang luas (Sugito, 2021:p.2). UN Women merupakan salah satu bagian dari *United Nation* yang dimana organisasi internasional ini memiliki banyak negara anggota yang membuat UN Women memegang peran penting terlihat dari keterlibatan negara-negara di dalamnya.

Clive Archer dalam bukunya yang berjudul *International Organizations* mendefinisikan organisasi internasional sebagai struktur formal dan berkesinambungan yang dibentuk melalui kesepakatan antar anggota (pemerintah dan/atau non-pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama anggotanya (Archer, 2001:p.33). Dengan gagasan itu, organisasi internasional dilihat sebagai sebuah struktur formal yang berkelanjutan dan terbentuk melalui kesepakatan para anggotanya yang merupakan dua atau lebih negara berdaulat untuk mencapai tujuan bersama. Begitu pula dengan UN Women yang di dalamnya terdapat negara-negara yang berkumpul demi mencapai tujuan bersama.

Organisasi internasional didirikan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya. Dalam hal ini mungkin saja sebuah organisasi internasional mengutamakan kepentingan salah satu anggota diatas kepentingan anggota lainnya, namun organisasi tidak boleh memiliki tujuan untuk mengejar

kepentingan salah satu anggotanya saja, tanpa menghiraukan kepentingan anggota lainnya (Archer, 2001:p.33). Artinya, sebuah organisasi internasional dalam membantu anggotanya untuk mengejar kepentingannya bisa saja mendahulukan kepentingan salah satu anggotanya namun bukan berarti organisasi internasional tersebut tidak menghiraukan kepentingan anggota lainnya. Dalam UN Women, hal ini seperti lebih mendahulukan negara yang dimana negara tersebut terjadi permasalahan yang lebih urgensi, tapi hal ini bukan berarti permasalahan di negara lain tidak diselesaikan.

Organisasi internasional berdasarkan jenisnya diklasifikasikan menjadi dua yaitu, *Intergovernmental Organizations* (IGO) dan *International Non-Governmental Organizations* (INGO). Adapun Karns dkk mendefinisikan kedua jenis organisasi internasional tersebut dan dikutip oleh Marco Amici dan Denita Cepiku.

1. *Intergovernmental Organizations* (IGO) yaitu organisasi antar pemerintah yang dimana anggotanya terdiri dari setidaknya tiga negara yang memiliki aktivitas di beberapa negara dan kemudian anggotanya disatukan melalui perjanjian formal antar pemerintah. UN Women merupakan salah satu bentuk dari IGO.
2. *International Non-Governmental Organizations* (INGO) yaitu organisasi swasta yang dimana anggotanya dapat terdiri dari individu maupun asosiasi yang berkumpul untuk mencapai tujuan bersama (Amici & Cepiku, 2020:pp.8-9).

Selain itu, terdapat perbedaan IGO dan INGO yaitu IGO harus terdiri terutama dari negara-negara berdaulat dan juga mempunyai status hukum sah yang diakui oleh konstitusi, konvensi internasional, dan perjanjian tuan rumah, sedangkan INGO dibentuk hanya berdasarkan hukum nasional (Amici & Cepiku, 2020:p.9). IGO memiliki ciri-ciri umum yaitu memiliki sifat permanen dalam kegiatan yang dilakukan berdasarkan perjanjian internasional yang tidak terbatas waktunya, memiliki badan pemerintahan dan eksekutif, serta mengikuti aturan prosedur tertentu. Mereka juga memiliki anggaran, kantor pusat, badan peradilan, dan sekretariat (Voronkov, 2018:p.24). UN Women yang merupakan salah satu IGO tentunya memiliki ciri yang dijelaskan tersebut, organisasi ini terdiri dari negara yang berdaulat, mereka berdiri dalam waktu yang lama dan juga mereka memiliki anggaran, kantor pusat dan lainnya.

Organisasi internasional melakukan tugas penting dalam struktur negara. Memberikan wadah untuk kerja sama diantara negara-negara anggotanya merupakan tujuan utama organisasi internasional. Faktanya, organisasi internasional tidak hanya menjadi tempat dimana orang membuat keputusan dengan bekerja sama, tetapi juga sebagai sarana administratif dalam membuat suatu kebijakan menjadi sebuah tindakan yang nyata. Fungsi lainnya juga untuk memfasilitasi saluran komunikasi yang kompleks antara pemerintah sehingga kepentingan masing-masing negara anggota dapat dievaluasi dan juga akan lebih mudah untuk mendapatkan solusi dari setiap masalah yang ada (Sugito, 2021:p.9). Dalam hal ini, UN Women sebagai sebuah organisasi internasional memiliki

kedudukan dan fungsi yang penting dalam tatanan internasional khususnya bagi negara-negara anggotanya.

Menurut Harold K. Jacobson dalam bukunya yang berjudul “*Networks of Interdependence : international organizations and the global political system*” yang dikutip dalam buku Sugito, fungsi organisasi internasional dapat dikategorikan dalam lima hal pokok, yaitu:

1. Fungsi informasi, yaitu didalamnya mencakup pengumpulan, analisis, pertukaran dan penyebaran data dan informasi, yang dimana nantinya organisasi internasional menyediakan tempat atau forum dimana para negara anggotanya dapat melakukan kegiatan-kegiatan tersebut (Sugito, 2021:p.11). Dalam UN Women ini terlihat dari bagaimana UN Women menyelenggarakan konferensi-konferensi umum, seperti lokakarya dan seminar.
2. Fungsi normatif yaitu fungsi dalam pendefinisian dan pendeklarasian suatu norma. Fungsi ini tidak mencakup undang-undang yang mengikat, hanya pernyataan-pernyataan yang berdampak pada lingkungan di dalam negeri dan di luar negeri (Sugito, 2021:p.11). Dalam UN Women ini terlihat dengan bagaimana UN Women memainkan peran penting dalam mendukung perbaikan norma dan standar global yang mempercepat realisasi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (UN Women, 2015).
3. Fungsi pembuatan peraturan yang mirip dengan fungsi normatif tetapi fokusnya pada efek yang lebih mengikat secara hukum. Para negara

anggota harus meratifikasi suatu peraturan yang disepakati bersama dan peraturan tersebut hanya berlaku bagi negara anggota yang meratifikasinya (Sugito, 2021:p.11). Para negara anggota UN Women harus mengikuti peraturan yang telah disepakati bersama.

4. Fungsi pengawasan atas pelaksanaan peraturan yang dimana organisasi internasional mengawasi pengimplementasian peraturan dengan menetapkan standar pelanggaran dan langkah-langkah penanggulangan yang diperlukan (Sugito, 2021:p.11). UN Women sebagai organisasi internasional akan memantau dan melaporkan kepatuhan sistem sebagaimana yang tertera dalam Report of the secretary-general A/64/588 (UN Women, 2019).
5. Fungsi operasional yaitu dimana organisasi internasional memberikan fasilitas sumber daya yang dimiliki. Hal ini dapat mencakup penggunaan bantuan keuangan dan teknis, serta kekuatan militer (Sugito, 2021:p.11). Dalam UN Women ini terlihat dari bagaimana UN women membantu negara anggotanya dengan dukungan finansial yang merupakan salah satu peran utama dari UN Women (UN Women, 2024).

Clive Archer (2001) dalam bukunya menjelaskan tiga peran utama yang dimiliki oleh organisasi internasional, sebagai berikut:

1. Instrumen

Peran organisasi internasional sebagai instrumen yaitu dimana saat organisasi internasional digunakan sebagai sarana oleh para negara

anggotanya dalam meraih sebuah kesepakatan dan mencapai tujuan tertentu (Archer, 2001:p. 68). Dalam hal ini UN Women sebagai sebuah organisasi internasional menjadi sebuah alat dalam menjalankan kebijakan masing-masing negara anggotanya dan tentunya menjadi sarana diplomasi sejumlah negara yang berdaulat.

2. Arena

Peran kedua organisasi internasional yaitu peran sebagai arena, yaitu dimana organisasi internasional menjadi arena atau forum dimana *action* terjadi (Archer, 2001:p. 73). Dalam hal ini UN Women sebagai sebuah organisasi internasional menyediakan tempat bagi para negara anggotanya berkumpul guna untuk berdiskusi, berdebat, bekerja sama ataupun saling tidak setuju. Arena tersebut bersifat netral dan dapat digunakan untuk berbagai kegiatan, mulai dari diskusi yang serius hingga konflik atau perbedaan pendapat yang intens.

3. Aktor Independen

Peran ketiga yaitu organisasi internasional berperan sebagai aktor independen. Dalam hal ini kata yang disoroti adalah kata *independent* yang merujuk bahwa suatu organisasi internasional diluar sana dapat bertindak dalam membuat keputusan di kancah dunia tanpa dipengaruhi dan tanpa campur tangan dari suatu pihak baik pihak eksternal ataupun pihak internal (Archer, 2001:p. 79). Dalam artian, UN Women harus menjadi aktor yang

membuat keputusan mandiri dan memberikan pengarahannya bagi negara anggotanya dalam melaksanakan suatu tindakan yang telah disepakati.

Berdasarkan pemaparan Clive Archer dalam bukunya tentang teori peran organisasi internasional, teori tersebut akan digunakan dalam penelitian ini karena keterhubungan dengan tema yang penulis angkat. Penelitian ini akan menggunakan teori peran organisasi internasional untuk menggambarkan dan menjelaskan peran dari *United Nation Women* dalam memajukan kesetaraan gender di Korea Selatan. Penggambaran dan penjelasan tersebut tentunya berdasarkan dengan data-data yang kredibel dan sesuai dengan fenomena penelitian yang diangkat oleh penulis.

B. Kesetaraan Gender

Istilah “gender” mengacu pada perbedaan antara karakteristik perempuan dan laki-laki yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial budaya yang terkait dengan sifat, status, posisi, dan peranannya dalam masyarakat. Sementara itu, istilah “seks” mengacu pada perbedaan jenis kelamin perempuan dan laki-laki secara biologis, yang dimana ciri biologis ini tidak dapat dipertukarkan dan datang secara alami (Subandi, 2021:p.5). Perlu diketahui jika gender dan seks merupakan hal yang berbeda, gender dapat dibentuk berdasarkan konstruksi sosial sedangkan seks merupakan sifat bawaan yang tetap.

Oakley dalam bukunya yang berjudul *Sex, Gender, and Society* yang dikutip oleh Zofia Lapniewska, berpendapat bahwa menjadi seorang pria atau wanita, anak laki-laki atau perempuan, sangat dipengaruhi oleh cara berpakaian,

gerak tubuh, pekerjaan, jaringan sosial, dan kepribadian, sama pentingnya dengan memiliki organ intim tertentu (Lapniewska, 2014:p.61). Dengan kata lain, identitas gender seseorang tidak hanya ditentukan oleh jenis kelamin biologisnya tetapi harus melihat berbagai faktor yang ada disampingnya.

Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki, hal ini bukan berarti untuk mengubah struktur secara fundamental, namun bertujuan untuk memasukkan perempuan ke dalam struktur yang sudah ada yang didasarkan pada prinsip kesetaraan dengan laki-laki (Subandi, 2021:p.15). Dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender, masyarakat perlu memberikan hak dan kesempatan yang sama seperti yang dimiliki oleh laki-laki. Dengan memberikan hak dan kesempatan yang setara, perempuan dapat menggunakan potensi mereka secara maksimal sehingga dapat setara dengan laki-laki (Subandi, 2021:p.2). Dalam hal ini, diharapkan bahwa masyarakat khususnya di Korea Selatan dapat mendorong perempuan untuk dapat setara dalam struktur kehidupan dengan laki-laki dan semuanya ini dilakukan dengan memberikan hak dan kesempatannya dalam bidang apapun.

Adapun beberapa pendapat terkait dengan tujuan kesetaraan gender dan faktor utama yang mendorong peningkatan kesetaraan gender. Negara-negara Nordik mendefinisikan tujuan kesetaraan gender sebagai berikut: “manusia, perempuan dan laki-laki, harus mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama di semua bidang kehidupan”. Ronald Inglehart dan Pippa Norris yang dikutip oleh zofia mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mendorong meningkatnya kesetaraan gender: pembangunan sosial dan ekonomi,

keterlibatan negara dalam merancang kebijakan dan struktur untuk memperkuat hak-hak dan peluang perempuan, warisan sejarah dan peningkatan sikap egaliter gender akibat budaya norma, nilai, dan kepercayaan (Lapniewska, 2014:pp.83-84). Negara berperan penting dalam mendorong kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu, Korea Selatan diharapkan dapat berperan dalam memajukan kesetaraan gender, salah satunya dengan merancang kebijakan yang dapat memperkuat hak dan peluang perempuan.

Pada dasarnya, perempuan telah mendapatkan keuntungan hak-hak yang luas, termasuk hak pilih perempuan yang hampir universal dan penerapan undang-undang di banyak negara untuk menjamin kesetaraan dalam hal warisan (Dilli et al., 2019:pp.31-32). Kemajuan lainnya bisa dilihat seperti adanya peningkatan jumlah anak perempuan yang bersekolah, penurunan jumlah anak perempuan yang dipaksa menikah, dan peningkatan jumlah perempuan yang menempati posisi kepemimpinan (Leal Filho et al., 2022:p.14181). Di seluruh dunia, anak perempuan telah mencapai kemajuan pendidikan yang jauh lebih baik, baik secara absolut maupun relatif dibandingkan dengan laki-laki, dan sekarang perempuan di mana pun dapat mengharapkan untuk hidup lebih lama dari laki-laki (Dilli et al., 2019:p.32). Perempuan telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam pemberian hak-hak, pendidikan, peningkatan partisipasi dalam kepemimpinan, serta penurunan angka pernikahan paksa, dan saat ini memiliki harapan hidup yang lebih tinggi daripada laki-laki di banyak negara di seluruh dunia.

Namun, dari semua kemajuan yang telah dirasakan ini belum berhasil menghapus diskriminasi secara keseluruhan terhadap perempuan. Contohnya, hanya 23 persen dari total anggota parlemen di seluruh dunia yang merupakan perempuan (Dilli et al., 2019:p.32). Pada 86 negara, perempuan masih dihadapkan dengan beberapa bentuk pembatasan kerja, dan selain itu terdapat 95 negara yang tidak menjamin kesetaraan upah bagi pekerjaan yang setara (World Bank, 2022). Di Korea Selatan sendiri, kesenjangan upah masih terlihat yaitu sebesar 31,1 persen pada tahun 2021 yang berarti meskipun mendapatkan beban kerja yang sama, perempuan hanya mendapatkan gaji 68,9 persen dari gaji laki-laki (Media, 2023). Dalam artian, kesetaraan gender di dunia belum merata dan masih memerlukan upaya lebih untuk semua perempuan dan anak perempuan dalam mendapatkan kesetaraan dalam hidupnya.

Kesenjangan gender dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk akses pendidikan dan sumber daya ekonomi, sering kali menjadi akar dari ketidakadilan gender yang juga dipengaruhi oleh stereotype masyarakat yang memandang perempuan sebagai individu yang pasif dan lemah (Subandi, 2021:p.6). Ini selaras dengan awal munculnya gerakan feminisme, yang dimana perempuan dianggap tidak rasional dan hanya dipandang dari sisi emosional, sementara laki-laki dianggap hanya untuk melindungi dan tidak perlu bekerja untuk mencari nafkah. Hal ini membuat perempuan secara diam-diam mulai melakukan gerakan-gerakan kecil untuk menentang dominasi laki-laki (Subandi, 2021:p.1). Diskriminasi yang dirasakan oleh perempuan tidak lepas dari pandangan orang-orang yang membedakan laki-laki dan perempuan, hal ini juga dirasakan oleh perempuan

Korea Selatan yang mengalami diskriminasi akibat adanya stereotype masyarakat yang melihat perempuan menjadi pihak yang lemah dibandingkan laki-laki.

Dalam sejarah, feminisme memiliki karakteristik keperempuanan, itu muncul dari kebangkitan perempuan untuk merubah status mereka sebagai makhluk kedua di dunia setelah laki-laki. Gerakan ini muncul pada abad pertengahan Eropa yaitu pada abad 16-19 Masehi (Subandi, 2021:p.14). Feminisme ini memiliki tujuan yaitu menyeimbangkan dan menciptakan interaksi sehat antara gender, yang dimana tidak ada salah satu gender yang diunggulkan dan didiskriminasi atas yang lainnya (Subandi, 2021:p.2). Feminisme memperjuangkan kesetaraan hak, perlakuan, kesempatan antara perempuan dan laki-laki, serta memahami dan menghormati peran kontribusi masing masing gender dalam masyarakat. Di Korea Selatan, gerakan feminisme juga digunakan untuk menolak segala ketidaksetaraan gender yang terjadi di Korea Selatan dan juga praktik patriarki yang masih melekat dalam masyarakat Korea Selatan

Dalam mencapai kesejahteraan manusia dan lingkungan, para kepala negara dan perwakilan tinggi di PBB menyusun “Agenda 2030” yang dimana didalamnya terdiri dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan 169 target. Pada SDG 5 “Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan”, mencerminkan upaya PBB yang terus meningkat dalam mencapai kesetaraan gender yang juga ditandai dengan pembentukan Komisi Status Perempuan pada tahun 1946 (Leal Filho et al., 2022:p.14179). Kesetaraan gender ditempatkan sebagai inti SDGs, dengan dimasukkan ke dalam setiap tujuan SDGs dan diutamakan di seluruh aspek

dengan mengingat bahwa perempuan merupakan separuh dari populasi yang membuat kesetaraan gender ini sangat penting dalam mencapai SDGs (Yun, 2021:p.1). Dengan memasukkan kesetaraan gender kedalam inti SDGs ini merupakan langkah awal PBB dalam memajukan kesetaraan gender di seluruh dunia terkhusus pada negara-negara yang kesetaraan gendernya rendah seperti Korea Selatan.

Ada banyak alasan mengapa kesetaraan gender harus dipertimbangkan dalam kaitannya dengan SDGs. Jika kita tidak memanfaatkan sebagian dari talenta yang ada di dunia, maka kita akan gagal dalam mengurangi kemiskinan (SDG 1) dan mendorong pertumbuhan ekonomi (SDG 8). Pada tahun 2030, kesetaraan gender akan membantu mengurangi kemiskinan ekstrem dan meningkatkan produk domestik bruto (Leal Filho et al., 2022:p.14181). Mencapai kesetaraan gender merupakan masalah hak asasi manusia dan sangat penting untuk mencapai kemajuan dalam seluruh tujuan dan target, seperti yg disoroti sebelumnya. Ketidaksetaraan gender bersinggungan dengan ketidaksetaraan lainnya, ketidakseimbangan kekuasaan, dan praktik diskriminatif. Karena itu, ketidaksetaraan gender menjadi salah satu jalan penting untuk mengatasi akar penyebab yang menghambat pembangunan berkelanjutan secara global (Leal Filho et al., 2022:p.14188). Dengan memperjuangkan kesetaraan gender, Korea Selatan juga dapat sekaligus menangani ketidakadilan dalam berbagai bidang lainnya, yang merupakan langkah penting menuju pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Ketidaksetaraan gender yang tersebar luas di seluruh dunia ini membuat perempuan mengalami serangkaian kerugian dibandingkan dengan laki-laki. Namun, pembangunan berkelanjutan mengharuskan masyarakat menikmati persamaan hak dan mampu menghargai kehidupan, bebas dari kekerasan dan diskriminasi (Leal Filho et al., 2022:p.14181). Perlu diketahui bahwa ketidaksetaraan yang dirasakan perempuan dan laki-laki tidak hanya penting secara moral tetapi juga karena manfaat yang diberikannya. Ketidaksetaraan gender telah terbukti berdampak pada hasil pembangunan, seperti meningkatkan akses perempuan terhadap sumber daya dan status hukum yang dapat meningkatkan pendidikan anak, mengurangi korupsi pemerintah, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi (Dilli et al., 2019:p.32). Mencapai kesetaraan gender di seluruh dunia adalah hal penting, oleh karena itu, Korea Selatan harus berusaha untuk memajukan kesetaraan gendernya karena hal ini dapat memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan mulai dari pendidikan, politik, ekonomi dan lainnya.

C. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan penelitian ini, tentunya penulis akan menyajikan beberapa referensi yang relevan dengan judul penelitian ini. Penelitian pertama yang relevan dengan judul penelitian ini yaitu, “Upaya Korea Women’s Association United dalam Memperjuangkan Kesetaraan Gender di Ranah Politik Korea Selatan” yang ditulis oleh Oktavia Widya Kumalasari dan Hamdan Nafiatur Rosyida (Kumalasari & Rosyida, 2022). Penelitian ini membahas peran Korea Women’s Association United (KWAU) sebagai civil society dalam

memperjuangkan kesetaraan gender khususnya dalam bidang politik di Korea Selatan dengan memaparkan upaya-upaya yang dilakukan KWAU.

Dalam penelitian yang ditulis oleh Kumalasari dan Rosyida ini, membahas upaya KWAU dalam mengadvokasi kesetaraan gender dalam politik korea selatan. Meskipun pertumbuhan ekonomi Korea Selatan sangat pesat, namun ini tidak sebanding dengan tingkat kesetaraan gender yang ada di negara tersebut khususnya dalam bidang politik. Kesetaraan gender dalam politik masih rendah dikarenakan oleh beberapa faktor seperti ideologi patriarki dan ajaran konfusianisme. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KWAU terlibat dalam berbagai kegiatan seperti lobi politik, dan mengadvokasi undang-undang anti-diskriminasi untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Penelitian ini akan digunakan penulis untuk melihat bagaimana tindak diskriminasi gender yang ada terkhusus pada bidang politik di Korea Selatan. Adapun perbedaan penelitian dari Oktavia dan Hamdan dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini melihat peran dari civil society yaitu Korea Women's Association United dalam memperjuangkan kesetaraan gender di bidang politik Korea Selatan sedangkan penelitian penulis akan melihat peran dari organisasi internasional yaitu Un Women dalam memajukan kesetaraan gender di Korea Selatan.

Penelitian kedua yaitu “Beyond #WithYou: The New Generation of Feminists and the #MeToo Movement in South Korea” yang ditulis oleh Ki Young Shin (Shin, 2021). Penelitian ini membahas suatu gerakan sosial yang dilakukan di Korea Selatan yaitu Gerakan #MeToo. Gerakan #MeToo di Korea

Selatan ini memicu pedoman, kebijakan, dan reformasi baru untuk mengatasi kekerasan dan pelecehan seksual.

Dalam penelitian yang tulis oleh Shin ini, menjelaskan bagaimana gerakan #MeToo ini membuat para wanita muda berada di garis terdepan dalam menuntut perubahan untuk memerangi ketidaksetaraan gender dan seksisme dalam masyarakat Korea . Perempuan muda Korea berperan penting dalam mendorong gerakan ini dengan mengorganisir protes, berbagi pengalaman mereka di media sosial, dan menuntut tindakan pemerintah untuk mencegah dan menghukum kekerasan seksual. Mereka mengadvokasi reformasi melawan kekerasan seksual dengan berpartisipasi dalam demonstrasi, mendukung para korban, dan mendorong perubahan organisasi untuk melawan diskriminasi gender. Adapun dalam perbedaan penelitian dengan dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini membahas bagaimana gerakan sosial #MeToo membuat para perempuan di Korea Selatan bergerak memerangi kekerasan seksual dan juga untuk melawan diskriminasi gender yang ada, sedangkan penelitian penulis akan melihat bagaimana peran langsung dari UN Women dalam memajukan kesetaraan gender di Korea Selatan.

Penelitian ketiga yaitu “Patriarchy in Korean Society: Substance and Appearance of Power” yang ditulis oleh Boo Jin Park (Park, 2001). Penelitian ini membahas bagaimana sistem patriarki yang ada di Korea Selatan. Sistem patriarki dalam masyarakat Korea yang mengalami perubahan yang signifikan. Faktor-faktor seperti perubahan sosial dan ekonomi, wanita yang dilihat semakin memiliki kekuasaan dalam pengambilan keputusan dan generasi muda yang

mempengaruhi dinamika keluarga berkontribusi pada melemahnya struktur patriarki tradisional.

Pada penelitian ini, membahas faktor-faktor sosial seperti penggunaan internet secara umum telah membalikkan dominasi patriarki atas saluran informasi, yang mengarah pada pembagian informasi yang lebih majemuk di dalam keluarga, yang mengurangi diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan pangkat. Perempuan semakin berpengaruh dalam pengambilan keputusan keluarga melalui berbagai faktor seperti peningkatan kesempatan pendidikan, pekerjaan, dan kemandirian finansial. Pergeseran dinamika kekuasaan ini menantang struktur patriarki tradisional dimana laki-laki memegang tanggung jawab tunggal untuk urusan ekonomi dan perempuan terbatas pada peran domestik. Penulis menggunakan penelitian untuk melihat bagaimana bentuk sistem patriarki yang ada di Korea Selatan dan bagaimana transformasinya dari masa ke masa.